

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa kini pelayanan publik yang digerakkan oleh pemerintah merupakan pelayanan publik berbasis teknologi (e-government). Adanya layanan publik secara elektronik membantu dalam memfungsikan, mempercepat dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pemerintah tanpa kenal waktu dan tempat (Choiriyah, 2020). Perkembangan pelayanan publik secara elektronik dipandang sebagai sarana percepatan kemajuan good governance. Namun menurut laporan survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (2018), E-Government Development Index (EGDI), perkembangan e-Government Indonesia tertinggal dibandingkan negara lain hingga akhir tahun 2018, yakni Indonesia menduduki peringkat 7 Indonesia berada di peringkat ke-7 diantara negara di kawasan Asia Tenggara.

Peringkat tersebut masih jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura (peringkat ke- 7 EDGI), Malaysia (peringkat ke-48 EDGI), Brunei Darussalam (peringkat ke-59 EDGI), Thailand (peringkat ke-73 EDGI), Philippines (peringkat ke-75 EDGI), dan Vietnam (peringkat ke-88 EDGI) (Viona, 2022). Karena lemahnya infrastruktur TI (Teknologi Informasi) dan sumber daya manusia yang tidak memadai mengakibatkan peringkat e-Government global menunjukkan Indonesia berada di bawah rata-rata dunia (United Nation, 2018). Hal ini merupakan tantangan

bagi Indonesia untuk memiliki program inisiatif E-Governemnt sebagai modal menuju Good Governance, salah satunya dengan adanya inovasi *Smart City*.

Smart city merupakan tempat pelayanan cerdas berbasis ketertiban yang transparan dan membantu masyarakat menerima informasi dengan cepat, tepat dan akurat. Pada hal ini, kota menawarkan pelayanan publik yang mudah didapat dengan tempat dan waktu yang tidak terbatas. *Smart City* merupakan salah satu penerapan *E-governance* yang dilakukan pemerintah dalam memajukan teknologi, serta solusi pengelolaan sumber daya dan efisiensi energi. Pertumbuhan dukungan aplikasi telah memungkinkan munculnya ekosistem kreatif dalam industri teknologi, yang merupakan langkah awal yang positif menuju pengembangan *Smart City*. Namun pada faktanya, *Smart City* bukan sekedar tentang teknologi. Ini adalah perpaduan teknologi baru dengan sikap cerdas terhadap penggunaan teknologi dalam suatu organisasi (Suhono et al, 2015).

Salah satu contoh implementasi transformasi untuk mendukung SDGs adalah konsep *Smart City*. *Smart City* secara garis besar didefinisikan sebagai pengaturan atau tata kelola perkotaan yang menerapkan teknologi untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi dampak negatif urbanisasi yang mungkin ditimbulkan (Haryo Limanseto, 2021). Dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan *Smart City* dan *SDG's* memiliki hubungan antara keduanya dan saling berkaitan antara keberhasilan keduanya. Pada penerapannya, Pemerintah Indonesia menyikapi *SDGs* Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (*SDGs Nasional*)

hingga ke tingkat desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 yang berfokus pada *SDGs* desa (M. Ghufuran H. Kordi K, 2020).

Pembangunan Berkelanjutan tersebut dibagi menjadi beberapa aspek, salah satunya adalah aspek perekonomian yang memiliki tujuan membentuk perekonomian desa merata, aspek tersebut masih menjadi salah satu masalah sosial terbesar di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Amalia, 2019). Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan *SDGs* Desa maka diharapkan mampu memberi hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi faktual di desa tersebut. Keberadaan *SDGs* desa memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan pembangunan ekonomi. Hal ini juga merupakan faktor kunci dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja yang layak. Oleh karena itu, membawa *SDGs* tingkat desa merupakan langkah strategis mencapai *Smart City*.

Pelayanan publik dengan konsep *Smart City* ini sudah diterapkan oleh salah satu pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi telah berinovasi untuk mencapai *Smart City* dengan membentuk sebuah program bernama *Smart Kampung*. Pada 31 Mei 2016, program *Smart Kampung* resmi disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi mencanangkan program ini tentunya sebagai upaya pemerintah dalam mencapai *Smart City* yang berbasis teknologi (e-government) demi mencapai good governance pada daerahnya (Saputra & Pratama, 2023). Berbagai pelayanan administrasi di desa yang tadinya kompleks, saat ini bisa diselesaikan dengan efektif dan cepat karena semua

urusan administrasi dapat dilakukan di desa. Smart Kampung ini berhasil dalam pelaksanaannya hingga mendapat penghargaan. (Saputra & Pratama, 2023) Smart Kampung telah digunakan sebagai solusi e-Government yang inovatif. Beberapa penghargaan dari pengaruh Smart Kampung diantaranya yakni:

Tabel 1.1

Penghargaan Banyuwangi Pengaruh Smart Kampung

No.	Nama Penghargaan	Kategori Penghargaan	Tahun	Penyelenggara
1.	TOP IT	Leadership	2017	PT. Telkom Indonesia
2.	Indonesia Smart Nation Award (ISNA)	<i>Smart Society</i>	2020	Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)
3.	Gerakan Menuju Smart City	<i>Smart Economy</i>	2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
4.	Innovative Government Award	Kabupaten Terinovatif Nomor 1 Se-Indonesia	2022	Kementrian Dalam Negeri
5.	Digital Government Award	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2023	Pemerintah Pusat

Sumber: Olahan Penulis (2023)

Dalam Keberhasilan beberapa penghargaan diatas, Banyuwangi memperoleh penghargaan tersebut merupakan pengaruh dari diberlakukannya program Smart Kampung. Dengan adanya program ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Banyuwangi berhasil dalam menerapkan suatu program sebagai upaya mencapai *Smart City*. Program ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan

perekonomian desa serta peningkatan sumber daya manusia masyarakat yang tinggal di sana. Program Smart Kampung ini adalah model program modern berbasis teknologi yang digunakan untuk pelayanan publik kepada masyarakat terutama masyarakat desa yang memiliki keterbatasan dalam mengurus segala sesuatu kebutuhan layanan. Oleh karena itu, kehadiran Smart Kampung ini diharapkan menjadi jembatan untuk masyarakat khususnya desa untuk menjadi lebih mudah dalam mengurus segala sesuatu kebutuhan layanan tanpa mengenal batas dan waktu.

Pada penghargaan Smart Kampung di atas penulis sangat tertarik meneliti mengenai penghargaan pada kategori *Smart Economy* karena mengingat perekonomian merupakan masalah sosial di seluruh dunia hingga saat ini, selain itu perekonomian merupakan faktor dari keberhasilan dalam membentuk suatu daerah mencapai perekonomian yang merata. *Smart Economy* merupakan faktor yang sangat urgensi di teliti karena bidang perekonomian masyarakat menjadi penentu apakah suatu daerah telah mencapai kesejahteraan masyarakat atau belum.

Menurut (Giffinger.,2019) *Smart Economy* merupakan salah satu indikator keberhasilan Smart City. Pendekatan *Smart City* menurut Giffinger terdapat 6 (enam) indikator yakni : *Smart Economy, Smart People, Smart Governance, Smart Mobility, Smart Enviroment, Smart Living*. Namun, pada penelitian ini penulis sangat tertarik untuk meneliti pada bidang Smart Economy karena perekonomian merupakan sebagai bentuk indikator suatu daerah sejahtera. Jika *Smart Economy* memiliki perkembangan yang baik maka bidang yang lain akan ikut berkembang. Faktor ekonomi merupakan

pendorong utama Smart City. Maka dari itu, perekonomian adalah dasar utama yang menjadi tolak ukur berkembangnya bidang-bidang yang lain.

Menurut (Giffinger.,2019) *Smart Economy* (ekonomi cerdas) mencakup berbagai aspek kehidupan yakni (*Innovative Spirit*) Semangat Innovative, (*Entrepreneurship*) Kewiraswastaan, (*Economic Image & Trademarks*) Citra Ekonomi & Merek Dagang, (*Productivity*) Produktivitas, (*Flexibility of Labour Market*) Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja, (*International Embeddedness*) Keterikatan Internasional, (*Ability to Transform*) Kemampuan untuk Bertransformasi. Beberapa aspek tersebut merupakan suatu indikator bahwa suatu daerah telah berhasil dalam mencapai *Smart Economy*.

Smart Economy (Ekonomi Cerdas) mendorong pembangunan ekonomi melalui industri kreatif di sektor digital yang merupakan contoh dari pembangunan ekonomi cerdas. Penggunaan teknologi digital menciptakan banyak peluang bisnis baru dan menciptakan solusi efektif terhadap permasalahan pedesaan (Lombardi., et al, 2012). Pada akhirnya, hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan memberikan manfaat ekonomi lainnya. Teknologi digital merupakan salah satu contoh perkembangan *smart economy* (Lombardi., et al, 2012) . Penggunaan teknologi digital menciptakan banyak peluang bisnis baru dan seringkali menciptakan solusi efektif terhadap permasalahan pedesaan. Namun solusinya tidak berhenti pada sektor kreatif saja. Lingkungan bisnis secara umum juga harus diperhitungkan. Perekonomian yang cerdas terkait dengan faktor pertama yakni

masyarakat yang cerdas. Artinya, diperlukan masyarakat yang cerdas untuk membangun perekonomian yang cerdas.

Pada pelaksanaannya, salah satu desa di Banyuwangi yang telah berhasil melaksanakan program Smart Kampung adalah Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi (Vincentius, et al. 2019). Lokasi ini dipilih menjadi lokus penelitian karena pengembangan program Smart Kampung di desa ini lebih berhasil dibandingkan desa lain dengan program inovatif berbeda yang dikembangkan di desa tersebut. Ketapang merupakan desa sukses yang mengadopsi konsep Smart Kampung untuk pembangunan di wilayahnya dan berhasil memanfaatkannya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi desa (Vincentius, et al. 2019). Tentunya smart kampung ini adalah upaya pemerintah dalam mencapai *Smart City* yang berbasis teknologi (e-government) demi mencapai good governance pada daerahnya (Saputra & Pratama, 2023).

Selain itu alasan penulis tertarik pada Desa Ketapang karena desa tersebut merupakan *pilot project* yang berhasil menerapkan beberapa inovasi di bidang pelayanan publik dan meningkatkan sumber daya manusia warganya. Hebatnya lagi Desa Ketapang menjadi contoh dan motivasi daerah lain dalam penerapan Smart Kampung ini, sebagai contohnya adalah Pemdes Tamanbali yang menghadiri Pemdes Desa Ketapang untuk belajar dan studi tiru mengenai Smart Kampung (Website Resmi Desa TamanBali. 2018). Tidak hanya itu, Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro ini telah memiliki inovasi berupa server IT sendiri untuk meningkatkan pelayanan publik

berbasis online. Pihaknya juga membuat aplikasi sendiri bernama SIMADe untuk percepatan pelayanan administrasi (Mohammad Ulil Albab, 2017). Hebatnya lagi Desa Ketapang telah mendapat penghargaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) terbaik ke III se Kabupaten Banyuwangi (Malik Efendi, 2023). Oleh sebab itu, penulis tertarik meneliti mengenai apakah *Smart Economy* yang telah diterapkan oleh Desa Ketapang telah berhasil dalam mencapai *SDGs* Desa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis menemukan sebuah hasil apakah Smart Kampung di Desa Ketapang ini berhasil dalam upaya pembangunan berkelanjutan pada bidang ekonomi dengan pendekatan *SDGs* Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi objek pertanyaan penelitian ini adalah apakah pemerintah daerah telah berhasil dalam pembangunan berkelanjutan *SDGs* Desa dalam bidang ekonomi (*Smart Economy*) pada penerapan Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi ?

1. Bagaimana Smart Kampung bidang ekonomi (*Smart Economy*) dapat mendukung kesuksesan tujuan *Sustainable Development Goals* Desa atau *SDGs* Desa?

2. Bagaimana hambatan Smart Kampung bidang ekonomi untuk mendukung kesuksesan tujuan *Sustainable Development Goals* Desa atau *SDGs* Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan suatu penelitian adalah untuk memperoleh, menciptakan dan mengevaluasi pengetahuan. Begitu pula dengan objek kajian yang akan penulis analisis mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penulis yakni untuk mengetahui keberhasilan *SDGs* Desa bidang ekonomi pada implementasi Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian mengenai ‘*Smart Economy* Untuk Mencapai *SDGs* Desa’ Pada Penerapan Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi’ diharapkan bisa memberikan gambaran dan bermanfaat, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil riset ini dapat memperluas disiplin ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu Administrasi Publik. Bagi perguruan tinggi, harapannya hasil dapat dijadikan referensi akademis untuk mendukung penelitian dan inovasi akademis sebagai sarana dalam melaksanakan penelitian dan pembaharuan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis Guna memenuhi persyaratan menuntaskan perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik. Penulis berharap temuan artikel ini dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman sebagai panduan untuk terjun langsung ke masyarakat tentang layanan publik berbasis teknologi Smart Kampung yang telah diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- b. Bagi Pemerintah Hasil riset ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi secara merata di seluruh daerah.
- c. Bagi Masyarakat Sebagai media informasi serta penjelasan kepada masyarakat terkait Smart Kampung yang sudah menggunakan teknologi tanpa mengenal jarak dan waktu dalam memberikan pelayanan kepada mereka.

